



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **OCTAVIANUS PADUDUNG**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **191887**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.545.050.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/104 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/55 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 213 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 287.550.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/58 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/91 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
7. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 457.500.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.192.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 L, VRZ TRD 4X2 JEEP Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000



3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 4.2 L, VRZ TRD 4X2 (FASILITAS COP) JEEP Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S AT TRD MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 248.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	690.066.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	330.716.181
F. HARTA LAINNYA	Rp.	25.858.656
Sub Total	Rp.	9.784.190.837
III. HUTANG	Rp.	121.743.568
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.662.447.269

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.